

### III. PENGORGANISASIAN POSDAYA



*Pilihan organisasi/ atau manajemen diserahkan pada masing-masing Posdaya*

#### A. PENGORGANISASIAN

Untuk melaksanakan kegiatan perlu dipersiapkan manajemen pelaksana oleh pemrakarsa atau Tim Penyelenggara yang dibentuk khusus untuk itu. Pilihan organisasi atau manajemen diserahkan pada masing-masing Posdaya. Posdaya perorangan bisa saja manajemennya sangat sederhana dan diatur sendiri oleh pengambil prakarsa Posdaya, atau keluarga yang berkepentingan.

Manajemen Posdaya dalam lingkungan masjid bisa diatur oleh suatu Tim yang ditunjuk oleh pengurus masjid yang bersangkutan. Manajemen Posdaya yang dibentuk oleh suatu perusahaan diatur oleh suatu tim yang dikembangkan oleh perusahaan sponsor Posdaya tersebut. Begitu seterusnya. Posdaya sebagai milik masyarakat sebaiknya diatur manajemennya oleh masyarakat yang bersangkutan.

Namun demikian, karena kegiatan Posdaya yang selalu berkembang, maka pengelolaan Posdaya, agar bisa berjalan secara teratur, berkelanjutan dan berkembang, sebaiknya diatur dan diselenggarakan oleh suatu Tim Penyelenggara. Tim tersebut bertanggung jawab kepada

sponsor, dan difasilitasi oleh petugas yang ditunjuk pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Tujuannya adalah agar lebih mudah memperoleh komitmen yang tinggi dari unsur pemerintahan. Sebagai contoh :

### **1. Tingkat Desa**

Penasehat:

- Kepala Desa/Lurah  
LKMD/LMD

Penanggung Jawab :

- Tim Penggerak PKK Desa  
Pengurus RW/RT
- Kader Posdaya/Dasawisma  
Unsur-unsur lain yang dianggap perlu

Penyelenggara :

Masing-masing kader di Posdaya

### **2. Tingkat Dukuh**

Penasehat:

- Kepala Dukuh

Penanggung Jawab :

- Pengurus RW/RT
- Kader Posdaya

## **B. MEKANISME PEMBERDAYAAN DAN PELAYANAN**

Untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan ditingkat Posdaya para kader dianjurkan untuk mengikuti latihan, atau selalu menambah ilmu dan pengetahuan tentang masalah pemberdayaan keluarga. Para kader mengatur

kegiatannya sesuai kebutuhan anggotanya. Karena itu para kader harus rajin menjajagi kebutuhan anggotanya dan mencari referensi untuk meningkatkan kemampuan agar bisa memenuhi kebutuhan anggotanya.

Waktu pemberian informasi dan ajakan untuk berpartisipasi bisa dilakukan secara terpadu atau mengambil waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan dan kesediaan sarannya. Sebagai contoh, setiap minggu pertama dilakukan pemberdayaan dalam bidang KB dan kesehatan, pada minggu kedua diisi dengan pemberdayaan dalam bidang pendidikan dan pada minggu ketiga diisi dengan pemberdayaan dalam bidang wirausaha. Apabila kegiatan makin meningkat, bisa saja diadakan pertemuan khusus bagi keluarga yang memiliki anak balita untuk membahas secara khusus masalah-masalah tentang pengembangan anak balita. Begitu juga dengan keperluan lainnya.

Para kader harus selalu mencari terobosan agar para anggota Posdaya selalu tertarik untuk datang dan mendapatkan sesuatu yang berharga dari Posdaya dimana mereka ikut didalamnya. Alau Posdaya tidak mempunyai daya tarik lagi, hampir pasti anggotanya tidak mau lagi berkumpul atau datang ke Posdaya menghadiri pertemuan yang diselenggarakannya.

### **C. SUMBER DAYA**

Agar kegiatan Posdaya terlaksana dengan baik perlu dukungan tenaga, dana dan sarana. Sumber-sumber dukungan antara lain adalah :

## 1. Tenaga

- a. Tenaga KB-Kesehatan antara lain :
  - a). Pimpinan Puskesmas
  - b). PPLKB
  - c). Bidan Puskesmas/Bidan Desa
  - d). PLKB
  - e). Pembantu Bidan/Perawat
  - f). Staf Puskesmas
  
- b. Sektor pembangunan pendidikan dan sosial:
  - a). Guru /Penilik Sekolah.
  - b). Tim Pembina LKMD
  - c). Tim penggerak PKK
  - d). Kader-kader P3K , PSM dsb.
  
- c. Unsur Masyarakat:
  - a). L K M D
  - b). Kader Posyandu
  - c). PPKBD
  - d). Sub PPKBD
  - e). Kader Dasawisma
  - f). Kader Pembangunan desa
  - g). Kader Pemuda/Karang Taruna
  - h). Para siswa SMP dan SMA setempat
  - i). Pramuka
  
- d. Unsur pamong :
  - a). Camat
  - b). Lurah/Kepala desa dan perangkatnya, termasuk Kepala Dusun, Dukuh atau RW/RT.

## **2. Dana dan Sarana**

- a. APBN:
  - Departemen Kesehatan
  - BKKBN
  - Departemen Pendidikan Nasional
  - Departemen Sosial
  - Departemen Agama
  - Departemen Koperasi dan Sektor pembangunan lain yang terkait.
- b. APBD dari dinas-dinas terkait di tingkat:
  - Propinsi
  - Kabupaten/Kota
- c. Swadaya masyarakat, zakat dan sumbangan sosial lainnya
- d. Sumbangan dari donatur lainnya yang tidak mengikat.

### **D. PEMANTAUAN**

Agar kegiatan Posdaya berhasil guna dan berdaya guna sesuai tujuan dan sasaran yang telah digariskan, perlu diadakan pemantauan dari kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan dengan tujuan :

- a) Memperbaiki mekanisme keterpaduan pemberdayaan
- b) Bimbingan secara terus menerus agar pelaksanaan pemberdayaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- c) Meningkatkan cakupan wilayah dan sasaran.
- d) Memecahkan masalah-masalah yang ditemui di lapangan

- e) Memantau realisasi dan penggunaa dana dan sarana

#### **IV. LANGKAH PENGEMBANGAN DILAPANGAN**

Posdaya merupakan gagasan baru menyambut anjuran pemerintah untuk membangun sumber daya manusia dengan prioritas utama pengentasan kemiskinan. Posdaya mirip dengan Posyandu yang pernah dibentuk di masa lalu untuk bidang KB dan kesehatan. Posdaya bukan saja untuk KB dan Kesehatan tetapi merupakan forum pemberdayaan delapan fungsi keluarga.

Karena Posdaya merupakan lembaga atau forum baru, bany ak desa belum mempunyai Posdaya, atau belum banyak membentuk Posdaya. Untuk mengatasi keadaan ini, seperti diuraikan dimuka siapa saja bisa mulai membentuk Posdaya. Kalau suatu keluarga merasa terpenggil untuk membentuk Posdaya, apabila perlu bisa membentuk Tim Kerja, seperti Panitia untuk perhelatan, yang disertai tugas untuk merancang segala sesuatunya di lapangan.

Kalau pembentukan dilakukan oleh suatu organisasi masyarakat, maka pemrakarsa bisa memberi tugas kepada petugas yang ditugaskan di desa dan di kecamatan untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar bisa berjalan lancar. Dalam proses perintisan Tim Kerja atau petugas di desa dan di Kecamatan perlu mengkoordinir dan menggalang kerjasama dengan semua pihak yang mempunyai kaitan langsung, misalnya Camat, Pimpinan Puskesmas, Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB), Pengurus IBI Kecamatan, Organisasi Sosial dan PSM di Kecamatan, Petugas Pemberdayaan Masyarakat atau Bangdes, Kepala Sekolah SD, SMP, dan SMA, Pimpinan berbagai kursus,